



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu dan Parpol Tak Pelit Informasi kepada Media  
**Tanggal** : Senin, 19 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : -

KETUA Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk membuka informasi seluas-luasnya bagi insan pers.

Pasalnya Pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada publik untuk menyukseskan pemilu.

"Kawan-kawan penyelenggara pemilu juga sama, biarkan mereka bekerja. Jadi, informasinya juga cukup," ujarnya dalam acara Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024, Senin (19/6).

Kepada parpol, Ninik menghimbau untuk tidak diskriminasi kepada media. Parpol hendaknya tidak memilih-milih media tertentu untuk memberi informasi.

"Bagi parpol misalnya, janganlah pelit-pelit informasi, jangan ada diskriminasi, media ini dikasih, media ini enggak. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang substantif, undanglah teman-teman media," tambahnya.

Menurutnya dengan keterbukaan informasi yang luas, maka publik pun bisa memahami berbagai hal yang penting dalam mendukung suksesnya pemilu 2024. Sebab di era digital saat ini, ada begitu banyak informasi palsu atau hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial. Dan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harusnya menjadi rujukan untuk semua informasi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai bapers pers menjadi tekan strategis dalam pengawasan pemilu. Apalagi, Bawaslu mengusung tema gotong-royong dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

"Gotong-royong artinya pemilu ini bukan hanya tugas pemerintah, penyelenggara, peserta saja tapi semua masyarakat termasuk Pers. Di sini pers memiliki peran besar dan menjadi koalisi strategis Bawaslu," jelasnya.

Totok pun berharap kolaborasi dengan insan pers bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pers tetap fair dalam pemberitaan dan terutama memastikan tidak adanya hoax yang merugikan masyarakat.

Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU Reni Rinjani Pratiwi menambahkan bahwa pihaknya saat ini pun terus gencar menyebarluaskan informasi terkait pemilu dan tahapan-tahapannya. Menurutnya informasi terkait pemilu bukan hanya capres saja yang memang saat ini menjadi pembahasan hangat.

"Kalau kita tanya masyarakat soal pemilu itu pasti banyak yang ngomong capres capres. Padahal masyarakat harus tahu bahwa hari H pilpres itu 14 Februari 2014 dan ini tahapannya sedang berlangsung," jelas.

Saat ini KPU pun tengah membahas PKPU bersama Kemenkumham. Setelah pembahasan maka kerja sama dengan media untuk menyebarluaskan aturan pemilu perlu dilakukan secara masif. (Z-8)